

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berlandaskan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mensyaratkan adanya *meaningful participation*. Namun Putusan tersebut tidak dilakukan sesuai yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Presiden menerbitkan Perpu yang dalam pembentukannya tidak memenuhi syarat *meaningful participation*. Hal ini merupakan ketidakpatuhan terhadap konstitusi (*constitutional unobedience*) Presiden dan DPR, yang dapat menjadi preseden buruk.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam proses pengujian formil adanya *conflict of interest*, karena Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan semenda. Hal menjadikan tidak objektifnya pengujian tersebut. Dalam proses pembentukannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak mendapatkan persetujuan dalam persidangan yang berikut dan syarat kegentingan memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

#### B. Saran

Kegentingan memaksa yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi masih bersifat terlalu umum, membuat pemaknaan kegentingan memaksa masih

menjadi terlalu luas. Hal ini dapat menjadi potensi salah dalam menggunakan Perpu oleh Presiden, oleh sebab itu DPR harus segera menambahkan ketentuan dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam UUD 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Anshori dan Lutfhil., 2019 *Legal Drafting teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.*, Rajawali Pers, Depok.
- B. Hestu Cipto Handoyo., 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting.*, Kanisius, Yogyakarta.
- Daniel Yusmic P. FoEkh., 2021, *Perpu Dalam Teori dan Praktek.*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Haposan Siallagan dkk., 2008, *Ilmu Perundang-undangan di Indonesia.*, UHN Press, Medan.
- Husnu Abadi DKK., 2017, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie., 2007, *Hukum Tata Negara Darurat.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S., 2006, *Ilmu Perundang-Undangan 1.*, Kanisius, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2018, *Hukum Administrasi Negara.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sabian Ustman., 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Safa'at, M. A. DKK., 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167 . Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020

### **Penelitian Hukum**

AA Muhammad Insany Rachman dkk, 2023, *Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Ilmiah, Univeristas Nias Raya.

Muhammad Ammar Al-Hasan, 2023, *Konstitusionalitas Aspek Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja*, Skripsi, Universitas Andalas.

Ni Kadek Ayu Sri Undari dkk, 2021, *Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*, Jurnal Ilmiah, Universitas Udayana.

### **Jurnal Hukum**

- Antoni Putra, 2021, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3 Desember 2021, Komisi Yudisial Indonesia.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2017, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, Universitas Padjadjaran.
- Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, 2023, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja”, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, iustum.vol30.iss2.art2, Universitas Islam Indonesia.
- Novendri M. Nggilu, 2019, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi.
- Soeroso, F. L., 2013, “Pembangkitan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Indonesia.

### **Internet**

- Badan Kebijakan Fiskal, 2023, Kementerian Keuangan RI, Laporan ekonomi & Keuangan Perekonomian Indonesia 2022 Tumbuh Solid,  
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporanbulanan/file/1678153262\\_20230206\\_lekb\\_februari\\_2023pdf.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporanbulanan/file/1678153262_20230206_lekb_februari_2023pdf.pdf)  
Diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 18.00 WIB
- Devi Puspitasari, 10 Tuntutan Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR, hlm.1 <https://news.detik.com/berita/d-6593616/10-tuntutan-buruh-dan-mahasiswa-demo-tolak-perppu-ciptaker-di-dpr>, diakses 20 November 2023.

Aida Mardatillah, Konflik Kepentingan, Anwar Usman Diminta Mundur,  
hlm. 1 <https://WWW.hukumonline.com/berita/a/konflik-kepentingan--anwarusman-diminta-mundur-lt6298877ed910c/>,  
diakses 10 Desember 2023.

